



REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
TAHUN 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dibuat *berdasarkan* Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Amlapura dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Amlapura ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Amlapura ;

Rencana Aksi Perjanjian Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2020 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		c. Persentase penurunan sisa perkara				
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
		1. Banding				
		2. Kasasi				
		3. Peninjauan Kembali				
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi				
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi				
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan				
		b. Persentase perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan				
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	POS BANTUAN HUKUM						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di	24.000.000
	- Belanja Jasa Konsultan					OB		tingkat Pertama dan	24.000.000
2.	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA						Peradilan Umum	Bandung yang tepat waktu	8.890.000
	- Belanja bahan - Belanja barang persediaan barang konsumsi					PKR THN		2.800.000	6.090.000
3	PENETAPAN HARI SIDANG						Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Denpasar		3.500.000
	- Beban perjalanan dinas dalam kota					OK OK		3.500.000	
4.	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN								7.200.000
	Bahan								6.000.000
	Konsumsi Pengamanan dari kepolisian								1.200.000
5	MINUTASI						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		4.900.000
	- Belanja Bahan					PKR			4.900.000
5.	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA								6.000.000
	- Beban perjalanan dinas dalam kota - Pengiriman Petikan /salinan putusan					OK			3.500.000
6.	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN								6.000.000
	- Beban perjalanan dinas dalam kota - Pengiriman surat penahanan/perpanjangan penahanan					OK			3.500.000
									2.500.000
7.	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA								1.610.000
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Beban perjalanan dinas dalam kota					PKR OK		560.000	
								1.050.000	
8.	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA							1.100.000	

	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat					PKR			400.000
	- Beban perjalanan dinas dalam kota					OK			700.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
5.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai				
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja				
		c. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan				

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN								5.910.000
	Belanja Bahan					KEG			3.000.000
	Beban Jasa Lainnya					KEG			2.910.000
2.	RAPAT KOORDINASI INTERNAL								15.600.000
	Bahan					THN	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Layanan Dukungan Manajemen Satker Operasional	3.600.000
	Konsumsi Rapat (40 Org X 12 bulan					OK			12.000.000
3.	KONSULTASI KE TINGKAT BANDING								51.940.000
	RAKERNAS					OH			14.534.000
	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL					OK			3.900.000
4.	PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA								8.500.000
	Tes Urine (40 Orgx1 KEG								7.600.000
	Konsumsi/snack (45x 1 KEG)								900.000
5.	GAJI DAN TUNJANGAN						Program Dukungan		3.408.892.000

	Belanja Gaji Pokok PNS					THN	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Layanan Perkantoran	1.571.224.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS					THN			27.000
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					THN			110.230.000
	Belanja Tunj. Anak PNS					THN			36.572.000
	Belanja Tunj. Struktural PNS					THN			28.140.000
	Belanja Tunj. Fungsional PNS					THN			1.078.210.000
	Belanja Tunj. PPh PNS					THN			159.919.000
	Belanja Tunj. Beras PNS					THN			93.024.000
	Belanja Uang Makan PNS					OH			303.336.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS					THN			28.210.000
6.	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR								983.630.000
	Belanja Keperluan Perkantoran					THN			253.710.000
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					OT			52.000.000
	Belanja Barang operasional lainnya								8.254.000
7.	LANGGANAN DAYA DAN JASA								271.392.000
	Belanja Keperluan Perkantoran					BLN	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	162.000.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					THN			12.000.000
	Beban Langganan Listrik					BLN			89.592.000
	Beban Langganan Telepon					BLN			3.600.000
	Beban Langganan Air					BLN			4.200.000
8.	PEMELIHARAAN KANTOR								202.040.000
	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					THN			28.036.000
	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya					M2			37.300.000
	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					UNIT			136.704.000
9.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR								64.650.000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					OB			45.000.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya					STEL			19.800.000
9.	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM					OT			31.200.000

	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS KANTOR								1.010.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					UNIT			25.000.000
10.	Pembangunan/ Renovasi gedung dan bangunan						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	985.000.000

**KETUA
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

**GDE PUTRA ASTAWA, SH. MH.
NIP. 19770607 200112 1 001**

